

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (MBKM) DI PERGURUAN TINGGI PADA
MASA PANDEMI COVID 19**

Nailurrohmah Khoiri¹, Sutrisno²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nailurrohmah48@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi selama pandemi covid-19. Karena adanya aturan pembatasan tatap muka akibat dari pandemi covid-19 pastinya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan metode studi Pustaka (library research) melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur kemudian dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memaparkan bahwa pelaksanaan MBKM dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk program yang ditawarkan oleh pemerintah. Implementasi MBKM baik PTS, PTN, dan PTKIN belum seimbang dengan tujuan program yang telah dirumsukan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya terutama baik sebelum covid-19 dan semasa covid-19 yang berdampak pada kualitas lulusan Perguruan tinggi. Kebijakan MBKM memiliki dampak positif bagi perkembangan pendidikan khususnya dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dengan secara langsung terjun di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang seimbang antara pemerintah, PT, pihak mitra dan mahasiswa sehingga dapat tercapai dengan maksimal meski dengan berbagai keterbatasan selama pandemi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

ABSTRACT

This study aims to explore the implementation of the Merdeka Learning Campus Merdeka (MBKM) curriculum in tertiary institutions during the COVID-19 pandemic. Due to the rules limiting face-to-face contact as a result of the COVID-19 pandemic, there are bound to be obstacles in its implementation. By using the method of library research (library research) through a study of various sources of literature then carried out an analysis and drawing conclusions. Based on the results of the analysis,

this study explained that the implementation of MBKM can be carried out through various forms of programs offered by the government. MBKM implementation, both PTS, PTN, and PTKIN, has not been balanced with the program objectives that have been formulated. There were several obstacles in its implementation, especially both before Covid-19 and during Covid-19 which had an impact on the quality of university graduates. The MBKM policy has a positive impact on the development of education, especially in improving students' abilities by being directly involved in the community. Therefore, there needs to be balanced coordination between the government, universities, partners and students so that it can be achieved to the fullest even with various limitations during the pandemic.

Keyword : *Implementation, Policy, Freedom to Learn Independent Campus (MBKM)*

PENDAHULUAN

Kehadiran covid-19 tentunya memberikan dampak besar bagi seluruh aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri, dampak yang paling dirasakan oleh banyak orang adalah dampak negative. Mulai dari adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pemberlakuan *social distancing* dan *psychical distancing*, *lockdown* hingga di berlakukannya PPKM di era *new normal* merupakan beberapa keputusan pemerintah yang membuat aktivitas kehidupan normal terhambat. Begitu juga dalam aspek pendidikan, mulai dari di berlakukannya pembelajarn online hingga saat ini adanya sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan fleksibilitas kurikulum sekolah sesuai dengan keadaan wilayah. Itu semua pemerintah lakukan agar sistem pendidikan tetap berjalan sebagai mana mestinya, meski di tengah pandemi yang penuh batasan-batasan demi kebaikan bersama.

Namun jika dilihat dari sudut pandang berbeda, covid-19 jauh lebih banyak memberikan dampak positif. Bahkan dampak positif tersebut tidak hanya berpengaruh pada kehidupan masa sekarang, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Dampak positif tersebut adalah proses transformasi digital di dunia pendidikan. Sejak diberlakukan adanya pembelajran online maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik pendidik maupun peserta didik di tuntutan untuk lebih melek teknologi.¹ Karena hampir semua media dan sistem pembelajaran yang mendukung proses belajar online maupun PJJ berkaitan dengan media digital. Pendidik dan peserta didik memiliki peluang besar untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam proses pembelajaran, agar tetap menyenangkan meski dilakukan tanpa adanya tatap muka.

¹ Cici Ratnanenci, "Korelasi Dampak Covid-19 Dengan Era Society 5.0 Di Bidang Pendidikan," *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 6, no. 1 (2022), doi:10.26740/jdmp.v6n1.p1-6.

Dampak tersebut diatas ternyata memiliki keterkaitan terhadap kehidupan yang akan datang yakni di era *society* 5.0. Pada era tersebut, menuntut manusia agar mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan penyelesaian masalah-masalah di berbagai aspek kehidupan. Pendidikan harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi di seluruh aktifitas pembelajaran. Namun tidak hanya tergantung pada teknologi saja, tetapi juga kualitas sumberdaya manusia harus selalu di tingkatkan.²

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi era kemajuan teknologi tersebut. Salah satu upaya pemerintah pada level perguruan tinggi adalah meningkatkan kesinambungan antara profil lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan juga dunia industri dengan memberlakukan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Adanya kebijakan kampus merdeka diharapkan mampu mengikis kesenjangan antara dunia pendidikan dengan realitas dunia nyata.³ Program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dunia perguruan tinggi, diharapkan kedepannya dapat menghasilkan kualitas lulusan yang berguna bagi nusa, bangsa, negara dan juga agama.

Kebijakan MBKM telah dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sejak awal 2019 sebagai bentuk perwujudan dari Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Namun karena adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pembelajaran tatap muka ditiadakan, membuat kebijakan tersebut sempat terbengkalai. Sedangkan kebijakan kampus merdeka tetap harus dijalankan sebagai bentuk usaha meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan sistem baru yang sesuai dengan keadaan pandemi terhadap penerapan kebijakan kampus merdeka. Namun, pastinya terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, karena adanya keterbatasan antar mahasiswa ataupun dosen untuk berkoordinasi secara langsung dengan pihak prodi lain ataupun instansi lain yang terkait dan juga proses pembelajaran yang dilakukan secara *daring*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisah menyatakan bahwa terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka seperti penyesuaian ulang kurikulum, kurangnya SDM dan mitra magang, masih kurangnya prodi lain yang menjalankan MBKM, dan kendala dari sisi

² Henderikus Dasrimin, "Kampus Merdeka Di Tengah Pandemi Covid-19: Antara Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Education and Learning* 5, no. 1 (2021): 24–32, doi:10.31002/ijel.v5i1.4116.

³ Akrim Dkk, *Manifestasi Kebijakan Kampus Merdeka Di Masa Pandemi Covid-19,* " *Dalam Covid-19 & Kampus Merdeka Di Era New Normal* (Medan: UMSU Press, 2020). Hal, 164

mahasiswa yakni jaringan yang kurang stabil, pembelajaran yang kurang interaktif, sosialisasi yang perlu dimassifkan terkhusus di prodi, lambatnya penginputan nilai, dan kurangnya kegiatan di masa covid.⁴

Berdasarkan beberapa hal diatas, pengkajian terhadap pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi penting untuk dilakukan, khususnya di masa pandemi dengan adanya berbagai keterbatasan yang berimbas pada pelaksanaan Pendidikan. Kebijakan MBKM ini diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan teknologi yang akan terus mengalami perkembangan dan dapat selalu mengembangkan kompetensi lulusan meski ditengah keterbatasan pandemic covid-19.⁵ Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan menganalisis sejauh mana penerapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berjalan dalam pelaksanaan pendidikan dunia perguruan tinggi pada masa pandemi covid-19 di tengah segala keterbatasan aktifitas tatap muka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan studi Pustaka (*library research*). Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pemahaman terhadap teori-teori dari berbagai sumber literatur yang sesuai dengan fokus masalah.⁶ Pada penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sehingga sumber literatur yang penulis gunakan adalah terkait pelaksanaan MBKM. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan. Setelah semua sumber terkumpul, kemudian dianalisis dan disimpulkan sehingga memperoleh hasil yang dapat mendukung gagasan penelitian.

⁴ Andi Aco Agus and Nur Asiah, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar) Implementation of the Independent Campus – Freedom to Learn Policy (Study at the Faculty of Social Sciences and Law , Makassar," *Jurnal Kreatif Online (JKO)* 9, no. 4 (2021): 32–43.

⁵ Mohamad Erihadiana, Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, Qiqi Yulianti Zaqiah, "Konsep Dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 34–41, doi:10247476/reslaj.v4i1.458.

⁶ Miza Nina Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022), <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan MBKM

Kebijakan Kampus merdeka merupakan kebijakan dari menteri Pendidikan, Nadiem Makariem yang di berikan kepada perguruan tinggi untuk memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi.⁷ Proses pembelajaran dalam program kampus merdeka merupakan perwujudan dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dalam pembelajarannya memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan inovasi, kapasitas dan kreativitas kepribadian serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan permasalahan langsung di lapangan. Melalui program tersebut yang telah di rancang apabila di implemmentasikan dengan baik, maka soft skill dan hard skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.⁸

Adapun beberapa kegiatan pembelajaran di laur program studi sesuai dengan permendikbud No 3 tahun 2020 pasal 15 ayat (1) yang meliputi:⁹ pertukaran pelajar yang dapat dilakukan pertukaran pelajar antar prodi pada kampus yang sama, pertukaran pelajar antar prodi yang sama pada kampus yang berbeda maupun pertukaan antar prodi pada kampus yang berbeda, magang tau praktik kerja yang dilaksanakan selama 1-2 semester sehingga menambah pengalaman yang cukup bagi mahasiswa dengan adanya pembelajaran langsung di tempat kerja, asisten mengajar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pendidikan untuk turut serta meperdalam keilmuannya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan yang dilaksanakan bersama organisasi resmi, kegiatan wirasaha, studi/proyek independent, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik (KKNT).

⁷ Deni Sopiansyah, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, “Konsep Dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).”

⁸ Yayasan Hendayana, “Program Kampus Merdeka Ajak Mahasiswa Indonesia Menjadi SDM Kreatif Dan Adaptif,” Juli 2021,” *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi*, 2021, <http://dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/program-kampus-merdeka-ajak-mahasiswa-indonesia-menjadi-sdm-kreatif-dan-adaptif/>.

⁹ Ade Irma Susanty Dkk, “Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (Studi Pada Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom),” *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021).

Implementasi kebijakan

Menurut Grindle, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁰ Proses implementasi dapat dilihat setelah tujuan, sasaran, program kegiatan dan rencana biaya telah tersusun dan di tetapkan serta siap di publikasikan kepada khalayak umum. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasinya agar mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan yang telah di rencanakan. Implementasi kebijakan menurut Lane dibagi kedalam dua bagian yakni pertama, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *output* dan *outcome*. Dalam hal ini, implementasi merupakan suatu bentuk hasil dari maksud dan tujuan ataupun produk yang telah di susun. Kedua, implementasi merupakan fungsi dari kebijakan, perumus kebijakan, pelaksana kebijakan dan juga waktu pelaksanaan kebijkana tersebut.¹¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan wujud dari pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan dan di laksanakan oleh seluruh masyarakat dalam kurun waktu tertentu T.B Smith mengatakan bahwa, suatu kebijakan yang telah di rumuskan harus diimplementasikan dan hasilnya sebisa mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.¹² Keefektifan suatu program dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kesesuaian antara program dengan pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi bukti bahwa telah terjadi adanya aksi, interaksi dan reaksi dari hasil implementasi tersebut.

Edward III mengatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini:¹³

a. Communication

Komunikasi kebijakan memiliki bebrapa macam dimensi, diantaranya dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan public, kejelasan dan kesetaraan.¹⁴ Apabila koordinasi antar pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi terjalin dengan baik, maka akan memperkecil adanya kesalahan dan begitupun sebaliknya. Komunikasi implementasi mengharuskan para pelaku

¹⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1, doi:10.26858/jiap.v1i1.289.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Qiqi Yulianti Zaqiah Ihin Solihin, Hisny Fajrussalam, Koko Adya Winata, Sahudi, "Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Sman 6 Kota Bandung)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)* 4, no. 1 (2021): 13–23.

¹⁴ Ibid.

kebijakan untuk mengetahui dan mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga tidak terjadi kesalahan ketika menentukan sebuah kebijakan.

b. Resources (sumber daya)

Jika kebijakan sudah disampaikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia sangat penting, karena sebagai sumber penggerak kebijakan. Modal juga diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak terjadi hambatan dalam proses kebijakan. Sedangkan waktu sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan dan sebagai penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

c. Disposition (disposisi)

Disposisi merupakan karakteristik yang harus dimiliki pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Jika pelaksana kebijakan memiliki karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, demikian pula sebaliknya.

d. Bureaucratic structure

Bureaucratic structure merupakan konsep birokrasi yang digagas oleh Max Weber di Jerman.

Latar Belakang Kebijakan MBKM

Perubahan sosial, budaya dan dunia kerja serta kemajuan teknologi yang semakin pesat, mengharuskan kesiapan kompetensi mahasiswa lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perluasan dan penyesuaian kompetensi tidak saja hanya dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang terus berkembang dari waktu ke waktu secara cepat. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman secara optimal.

Berdasarkan pemaparan Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat koordinasi kebijakan Pendidikan Tinggi di Gedung Kantor Kemendikbud (24/1/2020), kebijakan Merdeka Belajar yang bertajuk Kampus Merdeka atau MBKM merupakan tahap awal

untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak.¹⁵ Beliau mengatakan bahwa Pendidikan Tinggi belum menyentuh aspek kualitas. Dalam hal ini, kebijakan MBKM merupakan salah satu jalan untuk Pendidikan Tinggi lebih meningkatkan kualitasnya dengan tidak membatasi ruang gerak mahasiswa untuk lebih mengeksplorasi kemampuan mereka.

Ada beberapa alasan dan juga tujuan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan MBKM, yakni:

1. Mendorong perguruan tinggi lebih adaptif dan berubah dengan cepat
2. Mempercepat inovasi seperti inovasi dalam kurikulum, pengabdian masyarakat maupun riset.
3. Menghilangkan paradigma pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan.
4. Melatih mahasiswa lebih adaptif dengan adanya pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi.

Selain dari sisi positif adanya kebijakan MBKM tersebut, dalam prakteknya masih terdapat kekurangan yang membuat kebijakan MBKM berjalan kurang maksimal. Hal tersebut adalah berkaitan dengan ketimpangan kualitas perguruan tinggi di Indonesia yang masih sangat tinggi.¹⁶ Terutama dalam hal administrasi, untuk melakukan kerjasama seperti perpindahan prodi dari satu kampus ke kampus yang lain, harus memiliki kriteria nilai akreditasi yang sama dan juga masing-masing perguruan tinggi memiliki perbedaan standar penilaian.

Dilansir dari berita kompas.com terkait kritik mahasiswa terhadap program Kampus Merdeka, dinyatakan bahwa perlu adanya monitoring secara berkala terhadap implementasi kebijakan MBKM ke perguruan tinggi dan memberikan masukan terkait mekanisme pelaksanaan secara intensif. Terutama perguruan tinggi yang berada di luar pulau Jawa, masih perlu mendapatkan pendampingan dan perhatian khusus terkait penerapan kebijakan MBKM. Mahasiswa masih bingung dengan skema administrasi, padahal tujuan dari MBKM adalah untuk menyamaratakan dan memaksimalkan implementasi pada semua perguruan tinggi serta memberi peluang terhadap mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan diluar program studi untuk menambah

¹⁵ Wahyu Adityo Prodjo, "4 Alasan Nadiem Makarim Mengeluarkan Kebijakan Kampus Merdeka," 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/20283891/4-alasan-nadiem-makarim-mengeluarkan-kebijakan-kampus-merdeka>.

¹⁶ Agnes Setyowati, "Merdeka Belajar–Kampus Merdeka: Antara Peluang Dan Tantangan," 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/15/094940671/merdeka-belajarkampus-merdeka-antara-peluang-dan-tantangan>.

pengalaman dan kompetensi.¹⁷ Hal tersebut dikarenakan, informasi terkait implementasi kebijakan MBKM masih minim sehingga tidak merata di laksanakan oleh seluruh perguruan tinggi.

Di masa pandemi ini juga menjadi salah satu tantangan, karena antara satu kampus atau prodi satu dengan kampus/prodi lain tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk melakukan koordinasi. Keterlibatan mahasiswa dan pihak mitra tidak dapat dilaksanakan seeluasanya seperti pada saat luring, banyak Batasan-batasan yang secara tidak langsung mempengaruhi peredaran kegiatan.¹⁸ Jadi, dalam pelaksanaannya masih diperlukan evaluasi dan dilakukan pertimbangan supaya kebijakan MBKM dapat dilaksanakan secara merata dan tidak membedakan dengan adanya status akreditasi perguruan tinggi. Serta diperlukan adanya program yang memudahkan baik dari sisi administrasi, koordinasi maupun pelaksanaannya melihat dimasa pandemi untuk kegiatan yang bersifat sosial masih dibatasi.

Dapat disimpulkan bahwa, meskipun kebijakan MBKM yang telah direncanakan memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, dan kekurangan inilah yang perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah supaya kebijakan MBKM dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh seluruh perguruan tinggi.

1. Adanya ketimpangan kualitas perguruan tinggi yang mengacu pada nilai akreditasi.
2. Kurangnya regulasi yang spesifik antara pihak mitra, kampus dan juga program pemerintah.
3. Informasi yang kurang menyeluruh dan rinci, sehingga menimbulkan kebingungan baik bagi mahasiswa maupun perguruan tinggi dalam proses administrasi pelaksanaan program, terutama di perguruan tinggi di luar pulau jawa.
4. Kurangnya monitoring dari pemerintah.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan adanya koordinasi yang kuat dan seimbang, sehingga dalam pelaksanaannya baik pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan dapat menerapkan dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Terlebih lagi dimasa pandemi, meskipun banyak keterbatasan yang membuat sistem pendidikan menurun, tetapi tidak berarti bahwa pelaksanaan pendidikan serta program-

¹⁷ Maria Fatima Bona, "BEM UGM Mengkritik Ketimpangan Akses Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka," 2022, <https://www.beritasatu.com/nasional/886323/bem-ugm-mengkritik-ketimpangan-akses-program-merdeka-belajar-kampus-merdeka>.

¹⁸ Joko Kuncoro et al., "Peningkatan Soft Skill Melalui Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," *Proyeksi* 17, no. 1 (2022): 112–26.

programnya berhenti begitu saja. Sistem pendidikan bisa terus berkembang dengan menyesuaikan dan memanfaatkan peluang yang ada dimasa pandemi ini, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan.

Bentuk-bentuk Penyelenggaraan Kebijakan MBKM di Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, menurut Nizam, aktivitas pembelajaran di luar prodi sudah dibuktikan dengan diturunkannya 15.000 mahasiswa untuk menjadi relawan dalam membantu memberikan edukasi terkait Covid-19. Selain itu, lebih dari 1.000 inovasi diciptakan oleh perguruan tinggi guna membantu menangani pandemi.¹⁹ Dengan kegiatan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda tersebut akan memunculkan problem solving dalam mencari solusi ditengah keadaan yang berbeda.

Meski ditengah pandemi, program kebijakan MBKM telah disusun dan disesuaikan dengan keadaan semasa pandemi. Program tersebut terdiri dari berbagai program flagship seperti kampus mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, magang dan studi independen bersertifikat (MSIB) dan International Student Mobility Awards (IISMA).²⁰ Program yang telah disusun tersebut berlaku bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik PTN, PTKIN maupun PTS.

Perguruan tinggi juga dapat melakukan beberapa program, seperti melakukan sosialisasi kebijakan MBKM kepada seluruh civitas akademik, workshop kurikulum yang telah direvisi, melakukan perjanjian Kerjasama antar kampus yang telah melaksanakan MBKM, ikut serta dalam program kampus mengajar, melakukan sosialisasi pertukaran mahasiswa merdeka, merencanakan proses implementasi MBKM.²¹ Program-program tersebut dapat dilaksanakan secara daring sehingga tetap terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan MBKM. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi mampu bergerak cepat untuk beradaptasi dengan program-program pemerintah yang ditawarkan meski ditengah keterbatasan demi menghasilkan lulusan yang kompeten baik pada bidang akademik maupun non akademik.

¹⁹ Setyowati, "Merdeka Belajar–Kampus Merdeka: Antara Peluang Dan Tantangan."

²⁰ Hendayana, "Program Kampus Merdeka Ajak Mahasiswa Indonesia Menjadi SDM Kreatif Dan Adaptif," Juli 2021,."

²¹ Berita Mambarasi Nehe, "Analisis Konsep Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pendemik Di STKIP Setia Budhi Rangkasbitung 2021," *Prosiding Seminar Nasional Setiabudhi* 1, no. 1 (2021): 13–19.

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa kurang lebih 50 ribu mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM resmi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti pada tahun 2021. Kedepannya beliau mentargetkan 150 ribu mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan MBKM tersebut. Beliau juga akan memperbesar anggaran sebesar 3x lipat dari biaya awal. Anggaran terbesar digunakan untuk mengakomodasi uang saku mahasiswa yang berpartisipasi yakni sebesar 2.5-2.8 juta per mahasiswa.²² Hal tersebut merupakan jawaban dari kementerian untuk permasalahan mengenai kurangnya perhatian pemerintah terhadap dana insentif dan bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa. Karena, masalah finansial merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh mahasiswa dalam mengikuti program MBKM.

Namun jika dilihat dari kesiapannya dalam mengimplementasikan MBKM, antara PTN, PTKIN dan PTS memiliki perbedaan karena adanya kendala terlebih lagi dimasa pandemic covid-19. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab, yakni,²³ keterbatasan perguruan tinggi dalam mengkonversikan mata kuliah, rumitnya melakukan kerjasama dengan mitra, sistem belum siap karena harus menyesuaikan antara kegiatan perkuliahan dengan program di luar prodi, kurangnya SDM dan dukungan dari mahasiswa, berkaitan dengan masalah jaringan, kurangnya kegiatan yang dapat dilakukan dimasa pandemi covid-19. Sebagai akibat dari pandemi, beberapa institusi/Lembaga mitra membatasi diri untuk melakukan Kerjasama meski sebelumnya telah memperoleh kesepakatan. Selain itu, banyak pihak yang merasa khawatir dengan resiko-resiko yang diakibatkan dari adanya pandemic, baik dari keluarga mahasiswa, prodi maupun Lembaga mitra.²⁴

Beberapa hal tersebut diatas, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan MBKM di tingkat perguruan tinggi khususnya ketika pandemi. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Perguruan Tinggi sebelum melaksanakan MBKM sebagai salah satu program di kampus. Berdasarkan hasil penelitian, yang harus disiapkan oleh kampus yakni sebagai berikut:

²² Trisna Wulandari, "Nadiem Makarim: Anggaran MBKM Naik 3x Lipat Tahun Depan," 2021, <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5776260/nadiem-makarim-anggaran-mbkm-naik-3-kali-lipat-tahun-depan>.

²³ Ratna Puspitasari and Riant Nugroho, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur," *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2021): 276–92, doi:10.33005/jdg.v11i2.2539.

²⁴ M Cakrawala and A Halim, "Ketercapaian Dan Kendala Implementasi Mbkm Di Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang," *Conference on Innovation and ...*, no. Ciastech (2021): 1017–24, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3441>.

1. Setiap perguruan tinggi mempersiapkan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan kebijakan MBKM
2. Membuat aturan, kde etik, prosedur, mekanisme pelaksanaan sistem yang akan digunakan dan program yang akan dikembangkan
3. Perlu mensosialisasikan dan menjajaki para pihak yang akan dijadikan sebagai mitra kegiatan, baik lembaga pendidikan, perusahaan maupun perindustrian.
4. Program studi melakukan identifikasi dan mengelompokkan mata kuliah yang dapat mendukung program MBKM yang diambil oleh mahasiswa.

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, banyak yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan di dalamnya. Seperti halnya pelaksanaan kebijakan MBKM pada suatu perguruan tinggi. Sinergi sangat dibutuhkan oleh seluruh warga kampus dan juga instansi mitra. Serta kurikulum kampus yang sudah ada tidak serta merta harus dirombak total.

Dampak Kebijakan MBKM Bagi Perkembangan Dunia Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Kebijakan MBKM mendapat sambutan positif dari dunia pendidikan. Karena program tersebut merupakan inovasi baru bagi pelaksanaan pendidikan untuk menyelaraskan antara kualitas lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di dunia pendidikan tinggi. Ada beberapa dampak positif dari adanya kebijakan MBKM, yakni mahasiswa mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan sesuai keahliannya, mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar, dapat meningkatkan lulusan bagi perguruan tinggi, meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, melatih dan mengasah soft skill. Jadi, melalui program MBKM pada masa pandemic covid-19, mahasiswa tetap dapat mengembangkan kemampuan interpersonalnya dan jiwa kepemimpinan yang dimilikinya.²⁵

Program MBKM ini memberikan ruang kepada mahasiswa untuk membantu lembaga Pendidikan dalam proses adaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 dengan segala keterbatasannya. Mahasiswa dapat membantu proses administrasi, kegiatan belajar mengajar, dan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Pendidikan.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya dan menjadi bagian

²⁵ Widiyono Aan, Irfana Saidatul, and Firdausa Kholida, "Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar," *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 16, no. 2 (2021): 102–7.

²⁶ G. Erlangga A. Meilia, "Aktualisasi Program Kampus Mengajar," *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 17, no. 2 (2022): 120–28.

dari realisasi makna *agent of change* di masyarakat secara langsung. Selain itu juga memberikan dampak positif bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pendidikan.

Namun meski mendapat sambutan positif dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yakni terkait informasi pemerintah yang kurang menyeluruh, kesiapan kampus dalam memfasilitasi mahasiswa dan kerjasama dengan pihak mitra. Dari kendala-kendala yang muncul, mengakibatkan beberapa kampus masih belum bisa melaksanakan program MBKM secara maksimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disalah satu perguruan tinggi swasta juga dikatakan bahwa dampak dari kebijakan MBKM hanya diarahkan pada pelaksanaannya dan masih belum ada dampak yang mengarah pada pengalaman tri dharma pendidikan. Program MBKM hanya diketahui oleh sebatas lingkup kampus saja, namun ketika mahasiswa diterjunkan ke masyarakat, sekolah-sekolah, instansi perusahaan, pihak-pihak tersebut belum mengetahui program tersebut. Oleh karena itu, ketika mahasiswa melaksanakan program MBKM masih dianggap hanya sebatas mempraktekkan apa yang diperoleh ketika belajar saja bukan sebagai bentuk pengabdian. Terlebih lagi selama pandemi, tidak dapat dipungkiri sulitnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan bekal lebih bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat.

Tingkat kesiapan kampus terhadap pelaksanaan MBKM juga memiliki dampak bagi perkembangan skill mahasiswa. Karena, ketika kampus mampu memfasilitasi dengan baik kebutuhan mahasiswa dalam melaksanakan program MBKM, maka kualitas lulusan juga akan semakin siap menghadapi kemauan dan kebutuhan di lapangan kerja. Sedangkan kampus yang belum siap memfasilitasi mahasiswa dalam pelaksanaan MBKM, maka itu juga berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa mengenai kebutuhan skill yang diperlukan oleh suatu instansi perusahaan.²⁷

Oleh karena itu, program MBKM akan dapat dirasakan dampaknya baik bagi mahasiswa, dosen, kampus atau perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat adalah ketika semua pihak yang terkait mampu bekerjasama dengan baik. Begitu juga pemerintah, mampu memberikan informasi yang menyeluruh dan massif kepada seluruh pihak untuk mengurangi terjadinya *miscommunication*.

²⁷ Muhammad Hafil, "Minat Mahasiswa Terhadap Program MBKM Tinggi," 2022, <https://www.republika.co.id/berita/r4vm1v430/minat-mahasiswa-terhadap-program-mbkm-tinggi>.

KESIMPULAN

Kebijakan MBKM merupakan sebuah inovasi yang diberikan oleh Kemendikbud untuk mempertemukan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri/perusahaan. Melalui beberapa program wajib yang ditawarkan, diharapkan dapat membantu meningkatkan skill mahasiswa sebagai bekal ketika terjun di dunia masyarakat maupun dunia kerja. Namun ketika di implementasikan, antara tujuan yang direncanakan dengan fakta masih belum sesuai. Terutama Ketika masa pandemi covid-19, banyak keterbatasan dalam pelaksanaannya karena tidak bisa dilaksanakan seeluas saat luring. Selain itu, Masih ditemukan beberapa kendala yang membuat kebijakan MBKM belum sepenuhnya berjalan maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi program secara *continue*. Sehingga, baik pemerintah, perguruan tinggi, pihak mitra maupun mahasiswa menemukan solusi agar kebijakan MBKM dapat dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia meski dalam situasi pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Meilia, G. Erlangga. “Aktualisasi Program Kampus Mengajar.” *Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 17, no. 2 (2022): 120–28.
- Aan, Widiyono, Irfana Saidatul, and Firdausa Kholida. “Implementasi Merdeka Belajar Melalui Kampus Mengajar Perintis Di Sekolah Dasar.” *METODIK DIDAKTIK Jurnal Pendidikan Ke-SD-An* 16, no. 2 (2021): 102–7.
- Agus, Andi Aco, and Nur Asiah. “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar) Implementation of the Independent Campus – Freedom to Learn Policy (Study at the Faculty of Social Sciences and Law , Makass.” *Jurnal Kreatif Online (JKO)* 9, no. 4 (2021): 32–43.
- Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1. doi:10.26858/jiap.v1i1.289.
- Bona, Maria Fatima. “BEM UGM Mengkritik Ketimpangan Akses Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” 2022. <https://www.beritasatu.com/nasional/886323/bem-ugm-mengkritik-ketimpangan-akses-program-merdeka-belajar-kampus-merdeka>.

IRFANI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

P-ISSN 1907-0969 E-ISSN 2442-8272

Volume 19 Nomor 1 Mei 2023

Halaman 1-16

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

- Cakrawala, M, and A Halim. “Ketercapaian Dan Kendala Implementasi Mbkm Di Prodi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang.” *Conference on Innovation and ...*, no. Ciastech (2021): 1017–24. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3441>.
- Dasrimin, Henderikus. “Kampus Merdeka Di Tengah Pandemi Covid-19: Antara Peluang Dan Tantangan.” *Indonesian Journal of Education and Learning* 5, no. 1 (2021): 24–32. doi:10.31002/ijel.v5i1.4116.
- Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, Qiqi Yuliati Zaqiah, Mohamad Erihadiana. “Konsep Dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Deni.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 34–41. doi:10247476/reslaj.v4i1.458.
- Dkk, Ade Irma Susanty. “Analisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) (Studi Pada Fakultas Komunikasi Dan Bisnis, Universitas Telkom).” *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021).
- Dkk, Akrim. *Manifestasi Kebijakan Kampus Merdeka Di Masa Pandemi Covid-19, Dalam Covid-19 & Kmapus Merdeka Di Era New Normal*. Medan: UMSU Press, 2020.
- Hafil, Muhammad. “Minat Mahasiswa Terhadap Program MBKM Tinggi,” 2022. <https://www.republika.co.id/berita/r4vm1v430/minat-mahasiswa-terhadap-program-mbkm-tinggi>.
- Hendayana, Yayat. “Program Kampus Merdeka Ajak Mahasiswa Indonesia Menjadi SDM Kreatif Dan Adaptif,” Juli 2021,,” *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi*, 2021. <http://dikti.go.id/kabar-dikti/kabar/program-kampus-merdeka-ajak-mahasiswa-indonesia-menjadi-sdm-kreatif-dan-adaptif/>.
- Ihin Solihin, Hisny Fajrussalam, Koko Adya Winata, Sahudi, Qiqi Yuliati Zaqiah. “Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Sman 6 Kota Bandung).” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEBSIS)* 4, no. 1 (2021): 13–23.
- Kuncoro, Joko, Agustin Handayani, Titin Suprihatin, Joko Kuncoro, Agustin Handayani, and Titin Suprihatin. “Peningkatan Soft Skill Melalui Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).” *Proyeksi* 17, no. 1 (2022): 112–26.

IRFANI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM

P-ISSN 1907-0969 E-ISSN 2442-8272

Volume 19 Nomor 1 Mei 2023

Halaman 1-16

<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>

Miza Nina Adlini, Dkk. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, No. 1 (2022). <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177>.

Nehe, Berita Mambarasi. “Analisis Konsep Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Masa Pandemi Di STKIP Setia Budhi Rangkasbitung 2021.” *Prosiding Seminar Nasional Setiabudhi* 1, no. 1 (2021): 13–19.

Prodjo, Wahyu Adityo. “4 Alasan Nadiem Makarim Mengeluarkan Kebijakan Kampus Merdeka,” 2020. <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/20283891/4-alasan-nadiem-makarim-mengeluarkan-kebijakan-kampus-merdeka>.

Puspitasari, Ratna, and Riant Nugroho. “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fisip Upn Veteran Jawa Timur.” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 2 (2021): 276–92. doi:10.33005/jdg.v11i2.2539.

Ratnanenci, Cici. “Korelasi Dampak Covid-19 Dengan Era Society 5.0 Di Bidang Pendidikan.” *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)* 6, no. 1 (2022). doi:10.26740/jdmp.v6n1.p1-6.

Setyowati, Agnes. “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka: Antara Peluang Dan Tantangan,” 2020. <https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/15/094940671/merdeka-belajarkampus-merdeka-antara-peluang-dan-tantangan>.

Wulandari, Trisna. “Nadiem Makarim: Anggaran MBKM Naik 3x Lipat Tahun Depan,” 2021. <https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5776260/nadiem-makarim-anggaran-mbkm-naik-3-kali-lipat-tahun-depan>